

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Timor Timur merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Portugal hingga Pada tahun 1975, proses penjajahan yang dilakukan oleh Portugal berlangsung begitu lama sekitar 450 tahun, melalui beberapa tahap perjalanan perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Timor-Timur untuk melepas belenggu dari Portugal. Situasi yang begitu kompleks dan rumit, Timor Timur pun berhasil memperoleh kemerdekaanya. Pada dasarnya, kemerdekaan yang diberikan oleh Portugal kepada Timor Timur banyak dipengaruhi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir).<sup>1</sup> Revolusi bunga merupakan alasan Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur.

Setelah terbentuk pemerintahan transisi dan mendengar kebijakan tersebut akan dikeluarkan, masyarakat Timor Timur pun langsung berinisiatif mendirikan partai-partai politik.<sup>2</sup> Partai-partai dari berbagai ideologi dan berbagai orientasi politik yang berbeda mulai berdiri di Timor Timur yakni APODETI, FRETILIN, UDT, TRABALISTA, KOTA. UDT (*Uniao Democratica Timorese*)

---

<sup>1</sup> A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm.201.

<sup>2</sup> Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Cires FISIP UI, hlm.188.

menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, Sedangkan APODETI (*Associaao Popular Democratica Timorese*) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, dan FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar.<sup>3</sup>

Setelah partai-partai tersebut bermunculan, kondisi Timor Timur kian bergejolak dan begitu memanas akibat perselisihan politik antar partai. Kerusuhan dan pertumpahan darah merebak ke seluruh bumi Lorosae. Dari sisi kekuatan senjata, FRETILIN yang terkuat, sebab mendapat dukungan dari pasukan pribumi militer Timor Portugis. FRETILIN mulai menyerang UDT dan APODETI yang memaksa UDT untuk bersatu dengan APODETI untuk menghadapi FRETILIN. FRETILIN membantai puluhan ribu rakyat yang menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia termasuk banyak tokoh APODETI. Gubernur Timor Portugis waktu itu (gubernur terakhir), Mario Lemos Pires, yang seharusnya bertanggung jawab memulihkan ketertiban dan keamanan justru mengevakuasi sebagian besar pasukan Portugis ke Pulau Atauro dan membiarkan koloni Portugis tersebut dalam kekacauan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www.kompasiana.com/mozesadiguna/masa-integrasi-adalah-masa-terindah-bagi-timor-timur\\_551fdbef813311f0379df43c](http://www.kompasiana.com/mozesadiguna/masa-integrasi-adalah-masa-terindah-bagi-timor-timur_551fdbef813311f0379df43c) *Masa Integrasi Adalah Masa Terindah bagi Timor Timur* Mozes Adiguna (Jakarta: 07 Maret 2013). Diakses 4 September 2015.

<sup>4</sup> [http://www.kompasiana.com/mozesadiguna/masa-integrasi-adalah-masa-terindah-bagi-timor-timur\\_551fdbef813311f0379df43c](http://www.kompasiana.com/mozesadiguna/masa-integrasi-adalah-masa-terindah-bagi-timor-timur_551fdbef813311f0379df43c) *masa kolonial portugis* (Jakarta: 07 Maret 2013). Diakses 3 September 2015.

Pada tanggal 28 November 1975, FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan memproklamkan kemerdekaan Timor Timur. APODETI, UDT, TRABALISTA, dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari NKRI.<sup>5</sup> Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araujo (ketua APODETI) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (ketua UDT). Kemudian, TNI mulai memasuki dan membebaskan Timor Timur dari kebidaban FRETILIN, invasi Indonesia atas Timor Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia menginvasi Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme.<sup>6</sup>

Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan dimana sekitar 100-180,000 tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan. Upaya pembebasan itu dikenal dengan nama Operasi Seroja.<sup>7</sup> Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu, yang tercantum dalam TAP MPR No. VI/MPR/ 1978, tidak pernah mendapat

---

<sup>5</sup> A. Kardiyat Wiharyanto. *Op.Cit.*, hlm.204.

<sup>6</sup> East Timor truth commission finds U.S. "*political and military support were fundamental to the Indonesian invasion and occupation*" The National Security Archive, 24 January 2006.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

pengakuan internasional.<sup>8</sup> Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timor Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut.<sup>9</sup>

Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutar balikkan fakta, dengan mengeksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983 pembicaraan tentang Timor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB.<sup>10</sup> Pada pertemuan perundingan Tripartit pun akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timor Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalah Timor Timur.

Menimbang adanya permintaan mengenai tuntutan pemberian otonomi luas, akhirnya presiden B.J Habibie memutuskan mengiyakan permintaan tersebut dan memberikan otonomi luas tersebut. Pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh,

---

<sup>8</sup> Soenarto HM. 2003. *Pergulatan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Lembaga Putra Fajar, hlm.94.

<sup>9</sup> <http://www.tokohindonesia.com/berita/article/307-topik-pilihan/2751-presiden-habibie-lepaskan-timor-timur> diakses 4 September 2015.

<sup>10</sup> Zacky Anwar Makarim, dkk.2003. *Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*. Jakarta: PT. Sportif Media Infomasindo, hlm.22.

dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan.<sup>11</sup>

Dengan adanya tawaran dari pemerintah Indonesia berupa Otonomi luas tersebut dapat memberi kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk dapat memilih Kepala Daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus daerahnya sendiri. Keputusan untuk mengeluarkan Opsi mengenai otonomi luas di Timor Timur diambil oleh Presiden B.J. Habibie karena integrasi wilayah itu ke Indonesia selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB.<sup>12</sup>

Pemerintah Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan “*Senior*

---

<sup>11</sup> Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, *Indonesia di Ambang Perpecahan?*, Jakarta, 20000, hal.267.

<sup>12</sup> Copy the BEST Traders and Make Money : <http://bit.ly/fxzulu> PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR. Diakses pada tanggal 4 Januari 2016.

*Official Meeting*” (SOM) atau Pejabat Senior dibawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4 –5 Agustus 1998.<sup>13</sup>

Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak yaitu Portugal, Indonesia dan PBB sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris jendral PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga (*tripartite talks*) tersebut.<sup>14</sup>

Tanggapan positif mengenai rancangan otonomi luas juga diberikan oleh banyak tokoh dan kalangan moderat Timor Timur. Hal ini antara lain terlihat dalam diskusi yang diprakarsai oleh *East Timor Study Group* (ETSG).<sup>15</sup> Kemudian tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih

---

<sup>13</sup> PBB, *Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*, ( New York: Deppen Publik PBB, 2000), hal.9.

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> ETSG merupakan suatu lembaga yang beranggotakan para intelektual yang berasal dari Timor Timur, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam ( Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, *Op.Cit.*, hal.268).

bersifat khusus. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur.

Kondisi Timor Timur yang tidak memperoleh jalan keluar, kemudian mendapat tanggapan dari dunia internasional secara luas. Salah satunya adalah Perdana Menteri Australia (John Howard). Terjadi pergeseran kebijakan politik Republik Indonesia terhadap Timor Timur. Pada akhirnya Indonesia mulai menyetujui usulan dari perdana menteri Australia dan melakukan jajak pendapat untuk referendum. Jajak Pendapat merupakan suatu cara bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan dan tertarik untuk membahas dari adanya berbagai unsur permasalahan dan melihat pergeseran politik yang terjadi dari berbagai faktor internal maupun eksternal dalam proses kemerdekaan Timor Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan diatas penulis kemudian merumuskan:

*“Mengapa Indonesia memberikan peluang referendum kepada Timor Timur pada tahun 1999 ?”*

## **C. Kerangka Teori**

## **1. Proses Pembuatan Keputusan (*decision making process*)**

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain.

Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu.

William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to Internasional Politics* Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global.

Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.



Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatarbelakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang vacuum.<sup>16</sup>

Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan.

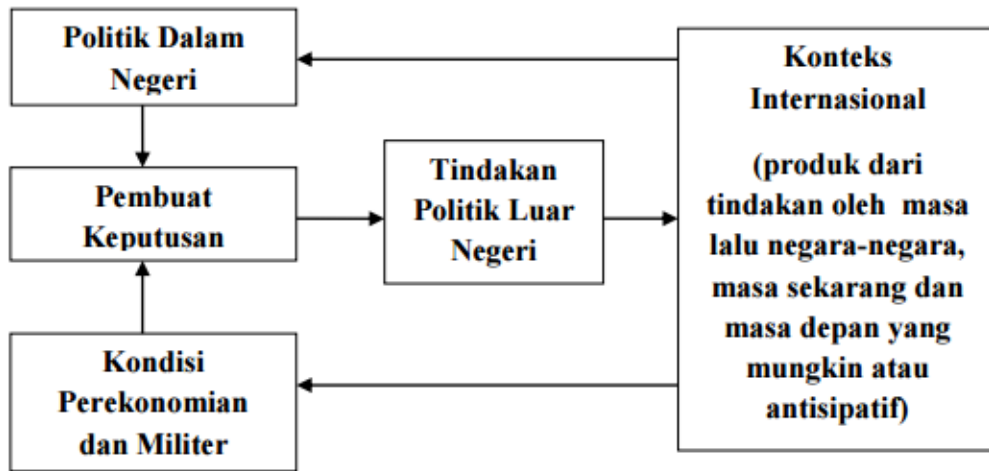
Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem. Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara :<sup>17</sup>

### **Gambar 1.1 Teori Pembuatan Keputusan William D. Coplin**

---

<sup>16</sup> [http://www.academia.edu/3700867/Decission\\_making\\_proses\\_coplin\\_-\\_model\\_resume](http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume)  
*Introduction to Internasional Politics* William D. Coplin.

<sup>17</sup> W.D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 165, sebagaimana dikutip dalam G. Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 17-18.



Source : William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah Teoritis*, edisi ke-2 Bandung, Sinar Baru, 1992.hal.30.

### A. Politik Dalam Negeri

Determinan ini melihat sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta bagaimana pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik dalam negeri berpengaruh terhadap perumusan serta pelaksanaan politik luar negeri. Sehubungan dengan ini, Bantarto Bandoro mengelompokkan determinan politik dalam negeri sebanyak 3 macam berdasar pada kecepatan dari perubahan yang terjadi (*pace of change*). Ketiga determinan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1) Determinan Yang Kestabilannya Tinggi (*highly stable determinants*)

<sup>18</sup> William D. Coplin, *ibid.*, hal.19.

Perubahan dalam determinan ini biasanya berjalan sangat lambat dan ada kemungkinan berubah secara mendadak. Contoh: lokasi dan ukuran geografi, sumber daya, dan populasi.

## **2) Determinan Yang Kestabilannya Moderat (*Moderately Stable Determinants*)**

Perubahan dalam determinan ini lebih lambat daripada determinan yang kestabilannya tinggi. Beberapa contoh determinan ini misalnya: budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.

## **3) Determinan Yang Sifatnya Tidak Stabil (*Unstable Determinants*)**

Determinan ini paling cepat mengalami perubahan. Beberapa contohnya ialah persepsi, sikap, dan faktor-faktor yang muncul secara kebetulan saja. Sikap publik bisa berubah dengan cepat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam alat yang digunakan dalam menjalankan politik luar negeri.

### **B. Perilaku Para Pengambil Keputusan**

Para pengambil keputusan yang dimaksud mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan.

### **C. Kondisi Ekonomi dan Militer**

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain.

### **D. Konteks Internasional**

Arti determinan ini ialah situasi politik internasional pada waktu tertentu yang mempengaruhi bagaimana suatu negara berperilaku. Menurut Coplin,

terdapat 3 elemen penting di dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis.

Berdasarkan dengan teori dari William D. Coplin penulis menganalisa yakni dalam situasi politik dalam negeri bermunculanya dualisme kepentingan dari gerakan separatisme antara gerakan pro-integrasi (yang menginginkan bergabung dan bersatu kedalam NKRI) dan gerakan pro-kemerdekaan (yang menginginkan kemerdekaan agar Timor Timur lepas dari NKRI dan merdeka) yang memicu konflik pertikaian besar di dalam negeri, tuntutan yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan kepada B.J Habibie agar diberikanya kemerdekaan kepada Timor Timur menjadi pertimbangan B.J Habibie sehingga menawarkan otonomi khusus bagi Timor Timur guna bentuk penyelesaian yang dapat dinilai adil bagi kesejahteraan masyarakat Timor Timur. Dari segi ekonomi, melemahnya ekonomi yang disebabkan oleh krisis yang sedang terjadi di Indonesia mengakibatkan Habibie menggunakan pilihan rasionalnya untuk mempertimbangkan pelepasan kasus Timor Timur, karena Timor Timur dinilai menjadi penyebab beban keuangan Indonesia dalam tahap proses pembangunan di Timor Timur. Dari segi militer, terjadi kesalahan yang dilakukan pada saat proses penganeksasian terhadap Timor Timur yg dilakukan oleh pemimpin sebelum Habibie yakni Soeharto dan invasi militer ke Timor Timur yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi internasional. Adapun dari konteks internasional yakni desakan dari pihak internasional yang ingin melakukan intervensi terhadap penyelesaian kasus antara Indonesia dengan Timor Timur yakni PBB dan Negara Australia. Australia menilai bahwa dari segi ekonomi dan segi politik Indonesia

dinilai tidak mampu menangani masalah Timor Timur. Dan juga dengan adanya desakan dari perdana menteri Australia John Howard yang menuntut kepada Indonesia agar Timor Timur dapat menentukan nasibnya sendiri (*right to self-determination*).

#### **D. Hipotesa**

Pertimbangan Indonesia dalam memberikan keputusan untuk diadakannya referendum kepada Timor Timur di tahun 1999, yaitu:

Faktor internal:

1. Penolakan diberikanya opsi I (otonomi khusus) dan tuntutan masyarakat pro kemerdekaan untuk referendum agar Timor Timur merdeka dari Indonesia.
2. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk memberikan referendum, karena Timor Timur dinilai membebankan perekonomian Indonesia.

Faktor eksternal:

1. Perubahan kebijakan Australia terhadap Indonesia dan desakan dari Perdana Menteri John Howard yang selalu melakukan provokasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur dan menuntut agar Timor Timur menentukan nasibnya sendiri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang :

1. Untuk mengetahui proses dinamika pelepasan Timor Timur dari Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan serta alasan mengapa Indonesia melepas Timor Timur.
3. Untuk sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dari hasil tersebut akan memperoleh generalisasi yang rasional.<sup>19</sup>

Sedangkan metode eksploratis dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian ketika peneliti kurang mengetahui dan memahami tentang suatu fenomena. Sehingga penulis akan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejadian tersebut.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini, penulis memberikan batasan penelitian mulai dari tahun 1990-1999. Dipilihnya tahun 1990, karena berdasarkan pada tahun ini terjadi berbagai rangkaian pertemuan antara Indonesia, Portugal dan PBB guna mencari penyelesaian kasus Timor Timur. Sedangkan di tahun 1999 adalah proses referendum dan diadakannya jajak pendapat. Adapun sedikit disinggung jangkauan diluar tahun penelitian tersebut selama masih ada keterkaitan dan korelevansian pada tema yang dibahas.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, 2014. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosdakarya. Bandung hal.5-6.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan (*library research*) baik melalui buku-buku majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, dokumentasi, koran, agenda dan hasil penelitian yang terdapat dimana saja yang bersumber dari media informasi situs di internet untuk membantu relevansi data-data yang diperoleh agar dapat diterapkan kedalam konsep sehingga menjelaskan kejadian faktual.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga karya tulis ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh.

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi proposal skripsi: terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jenis penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Penulis akan memaparkan tentang Timor Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia.

**BAB III** : Penulis akan memaparkan isu Timor Timur di dalam rangkaian pertemuan-pertemuan majelis umum PBB, Serta pertimbangan pemberian referendum berdasarkan faktor internal.

**BAB IV** : Penulis akan menjabarkan mengenai berbagai pertimbangan mengapa Indonesia memberikan peluang referendum berdasarkan faktor eksternal.

**Bab V**: Merupakan penutup dari tulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan. Kesimpulan ini adalah inti dari isi bab-bab sebelumnya yang telah diteliti hingga rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat terjawab dengan jelas.